

Sinopsis

Setelah 65 tahun negara ini merdeka, tetapi negara yang kaya raya ini masih saja miskin, terbelit utang dan ekonomi jalan ditempat. Ironisnya adalah realitas di mana bangsa ini perlahan kehilangan kedaulatan ekonominya. Para pemimpin pasca orde lama, tidak mampu untuk memenuhi cita-cita konstitusi, ini terbukti pada setiap kebijakan deregulasi ekonomi lebih menggadaikan bangsa ini ketangan kapitalisme asing. Puncak hilangnya kedaulatan bangsa ini ketika diturunkannya paket kebijakan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing dan PP No.76/2007 Tentang Usaha Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan serta PP No.77/2007 Tentang Bidang Usaha Terbuka dan Batas Kepemilikan Modal Asing Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono, yang kental dengan paham neoliberal. Penelitian ini mencoba mengungkap indikasi praktek-praktek neoliberal yang mempengaruhi paket kebijakan tersebut dan implikasinya terhadap demokrasi ekonomi dan politik.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan tehnik pengumpulan data melalui penelaaha dokumen-dokumen paket kebijakan deregulasi ekonomi. Kemudian mendekripsikan berbagai indikasi pengaruh paham neoliberal pada paket kebijakan deregulasi ekonomi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa indikasi pengaruh paham neoliberal terhadap demokrasi ekonomi dan politik, diantaranya : deregulasi, Pembukaan akses terhadap PMA dan Privatisasi, ini terbukti pada diterbitkannya paket kebijakan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing dan PP No.76/2007 Tentang Usaha Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan serta PP No.77/2007 Tentang Bidang Usaha Terbuka dan Batas Kepemilikan Modal Asing. Isi dari paket kebijakan ini pun terdapat indikasi paham neoliberal, diantaranya disiplin fiskal, reformasi pajak, jaminan hak kepemilikan individu, liberalisasi sektor strategis dan barang publik dan liberalisasi sektor keuangan. Implikasi negatif dari paham neoliberalisme adalah melemahnya demokrasi dan hilangnya pengawasan legislatif terhadap sektor-sektor ekonomi yang strategis dan menguasai hajat hidup kolektif.

Melihat pengaruh neoliberal dan implikasinya terhadap demokrasi ekonomi dan politik, maka peneliti mengajukan tiga saran mendesak bangsa. *Pertama*, mendesak pemerintah untuk mengembalikan watak kebijakan publik kembali kepada konstitusi yang merupakan cita-cita mulia bangsa ini. *Kedua*, Mendesak pemerintah untuk mengembalikan peran tradisional negara sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memfasilitasi secara monopoli atau pemain tunggal atas aset-aset yang berhubungan dengan kesejahteraan kolektif. *Ketiga*, mendesak pemerintah untuk memberlakukan